

---

## **ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGERA**

*ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT ACCOUNTING  
SYSTEM IN MINAHASA DISTRICT DIPENDA SOUTHEAST*

**Billy Rivaldy Pangalila<sup>1</sup>, Sifrid S. Pangemanan<sup>2</sup>, Jessy D. L. Warongan<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Sam Ratulangi, Manado, 95115, Indonesia  
Email: billyrivaldy@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Akuntansi pemerintah daerah dipisahkan menjadi 2 yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (SKPD). Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif, hasil penelitian menggambarkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sesuai berdasarkan peraturan - peraturan Akuntansi Pemerintah Yang Berlaku dan perlu adanya penggantian nama akun pada laporan perubahan ekuitas.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah

### **ABSTRACT**

*Local government accounting is separated into 2 of the regional work units (SKPD) and the Regional Finance Management Task Force (SKPKD), the object of this study is the Department of Revenue Southeast Minahasa Regency. The purpose of this study to determine whether the Department of Revenue Southeast Minahasa Regency has implemented the Government Accounting System in accordance with the Regulation of the Minister of Interior No. 64 Year 2013 on the application of accrual-based government accounting standards and Government Regulation No. 71 Year 2010 concerning the Government Accounting Standards. The analytical method used is descriptive data analysis, the results illustrate that the Government Accounting System at the Department of Revenue Southeast Minahasa Regency is quite appropriate by the Government Accounting theory Applicable.*

*Keywords : Accountability , Local Government , the Government Accounting System*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Otonomi daerah merupakan pembagian kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya. Kekuasaan ini diberikan oleh pemerintah pusat agar pemerintah setiap daerah dapat dikontrol dengan mudah oleh pemerintah pusat, Daerah memiliki hak, kewajiban dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai kebutuhan daerah yang berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab. Pemasalahan diatas merupakan hal yang melatar belakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara”

### Perumusan Masalah

Apakah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku ?

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah penerapan sistem akuntansi pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

### Tinjauan Pustaka

#### Akuntansi

Menurut Reeve, Warren, dkk (2010:9) akuntansi adalah “Sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisiperusahaan.”

#### Akuntansi Pemerintahan

Menurut Parera (2012:11) Akuntansi pemerintahan (governmental accounting) banyak menyatakan merupakan terminology lama, pada perkembangannya bergeser istilah akuntansi sektor publik, istilah ini didasarkan pada pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, dimana akuntansi pemerintah merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi - transaksi

keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

### **Standar Akuntansi Pemerintah**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan dan menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

### **Sistem Akuntansi Pemerintah**

Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PMK PP 71 Tahun 2010 pasal 1 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Menurut Kuncoro (2009:12) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk dianalisis atau menjawab pernyataan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

### **Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Kompleks Perkantoran Blok A. Kel. Wawali Minahasa Tenggara dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2016

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi latar belakang dalam penelitian ini
2. Merumuskan masalah dan menentukan tujuan serta manfaat penelitian
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai penyajian laporan keuangan
4. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif
5. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

### **Metode Pengumpulan data**

#### **Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini terbagi atas :

1. Data Kualitatif : data yang tidak berbentuk angka. Misalnya : kuesioner pertanyaan tentang susunan kerja, kualitas pelayanan sebuah rumah sakit atau gaya kepemimpinan, dll

2. Data kuantitatif : data yang berbentuk angka. Misalnya : harga saham, laporan keuangan, dll Adapun jenis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : sejarah singkat, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan jenis data kuantitatif yang digunakan yaitu : Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

### **Sumber Data**

#### 1. Data Primer (primary data)

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.

#### 2. Data Sekunder (secondary data)

Data sekunder adalah data yang diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi 3, yaitu :

#### 1. Survey Pendahuluan

Survey pendahuluan dilakukan untuk mengetahui gambaran umum dari lokasi penelitian, menentukan perumusan dan identifikasi permasalahan.

Kegiatan ini meliputi :

1. menentukan pilihan metode berdasarkan pada kemampuan data yang hendak digunakan.
2. Mengaati kondisi dilapangan serta menaksir keadaan yang berkaitan dengan mutu data yang diambil.

#### 2. Studi lapangan (field research)

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian,

#### 3. Studi kepustakaan (library research)

Maksud dari studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data teoritis yang menjadi landasan teori untuk melaksanakan penelitian ini dengan cara mempelajari berbagai buku dan literature yang berhubungan dengan penyusunan dan penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan Dalam pembahasan penelitian ini adalah metod analisis data deskriptif. Menurut sugiyono (2009:207) “metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

Dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara terdapat beberapa prosedur pengelolaan barang milik daerah (Aset) diantaranya:

## 1. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Pendapatan daerah terbagi menjadi; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain lain Pendapatan yang sah.

### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain Lain PAD yang sah.

Untuk itu dokumen yang digunakan sebagai alat pencatatan transaksi pendapatan asli daerah pada satker ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Dokumen Sumber PAD**

Transaksi	Dokumen
Pajak daerah dan retribusi daerah	-(SSPD) Surat setoran pajak daerah
Lain lain PAD yang sah	-surat tanda bukti penerimaan -bukti penerimaan lainnya

*Sumber: Dipenda Mitra*

### b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima oleh Dinas yang dimaksud adalah Dana Bagi Hasil Pajak yaitu antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak penghasilan, juga Dana Bagi Hasil, Sumber Daya Alam yang paling menojol di Kabupaten Mitra adalah kehutanan dan kelautan.

Untuk itu dokumen yang digunakan sebagai alat pencatatan transaksi Dana Perimbangan pada satker ini adalah sebagai berikut ;

**Tabel 2.**  
**Dokumen Sumber Dana Perimbangan**

Transaksi	Dokumen
DBH Pajak	-(SSPD-BPHTB) surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan -surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan
DBH Sumber daya alam	Menggunakan (SSPD) surat setoran pajak daerah

*Sumber: Dipenda Mitra*

Untuk itu semua hasil transaksi pendapatan yang terjadi pada saat itu juga disatker ini sudah diakui langsung sebagai penerimaan daerah yang sah pada saat terjadinya transaksi dan pencatatannya walaupun belum dilakukan penyeteroran pada Bendahara Umum Daerah. Semua juga didukung oleh sistem online yang terintegritas langsung dari pusat.

Contoh jurnal Pendapatan-LO :

Jurnal pendapatan yang terjadi di Dipenda Mitra adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 1 juli 2015 Bendahara pada Dinas Pendapatan Daerah Mitra menerima setoran pajak restoran Rp. 250,000.00, pajak rumah makan Rp. 22,551,750.00 dan pajak catering Rp. 601,927285.00. maka dari itu Bendahara di Dipenda Mitra mencatat transaksi tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

**Tabel 3.**  
**Contoh Jurnal Transaksi Pendapatan**

Tanggal	Kode Rek.	Keterangan	Debit	Kredit
1 juli 2015	1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Dipenda Mitra	624,729,035.00	
	4.1.1.02.01	Pajak restoran		250,000.00
	4.1.1.02.02	Pajak rumah makan		22,551,750.00
	4.1.1.02.03	Pajak catering		601,927,285.00

Sumber: data olahan penulis

**Analisis:**

1. Transaksi tanggal 1 Juli 2015 merupakan transaksi penerimaan pendapatan yang biasa dan hanya mempengaruhi akun kas dan akun pendapatan.
2. Setelah itu jika pendapatan akan disetorkan ke rekening Kas Daerah, maka bendahara pada SKPD mencatat pada Jurnal Umum.

Contoh jurnal Pendapatan-LRA:

Dari semua pendapatan yang diterima oleh DIPENDA Mitra tersebut semua kemudian akan disetor kepada Bendahara Umum Daerah (PPKD) selaku Kas Daerah pada hari yang telah ditentukan maka dari itu jurnal yang dicatat oleh Bendahara Dipenda Mitra adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.**  
**Contoh Jurnal Transaksi Penyetoran Pendapatan**

Tanggal	Kode Rek.	Keterangan	Debit	Kredit
2 juli 2015	4.1.1.01.01	Rek. Kas Daerah (BUD)	624,729,035.00	
		Kas diBendahara Dipenda Mitra		624,729,035.00

Sumber: data olahan penulis

**2. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas**

Pada bagian ini Dipenda Mitra mengklarifikasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanjanya, bahwa belanja terkelompokan meenjadi dua yaitu Belanja Langsung (belanja yang bersifat dan berdampak langsung terjadi karena adanya kegiatan dan program satker, contoh: upah honor, belanja keperluan kantor secara tiba dan perjalanan dinas) dan belanja Tidak Langsung (belanja yang bersifat tidak mempengaruhi secara langsung program program satker, contoh: gaji pegawai).

Dokumen yang menjadi dasar dalam pencatata transaksi belanja pada Dinas ini adalah :

**Tabel 5.**  
**Dokumen Sumber Pengeluaran Kas**

No	Transaksi Belanja	Dokumen Sumber	Lampiran Dokumen Sumber
----	-------------------	----------------	-------------------------

1	Belanja Operasional (belanja langsung)	Operasional tidak	-SP2D -nota debit bank -bukti pengeluaran lainnya	-SPM -SPD -bukti tanda terima barang / jasa
2	Belanja Modal (belanja langsung)		-SP2D -nota debit bank -bukti pengeluaran lainnya	-SPM -SPD -bukti tanda terima brang dan jasa

Sumber: Dipenda Mitra

Berikut ini contoh jurnal akuntansi belanja yang terjadi pada Bendahara DIPENDA Mitra :

1. Akuntansi Belanja Uang Persediaan (UP)

Pada Tanggal 1 Agustus 2015, Bendahara Dipenda Mitra melakukan pencairan SP2D Uang Persediaan (UP) atas pembayaran Tunjangan Gaji pegawai sebesar Rp. 35,750,000.00

**Tabel 6.**  
**Contoh Jurnal Belanja**

Tanggal	Kode Rek.	Keterangan	Debit	Kredit
1 Agustus 2015	1.1.1.03.01	Kas diBendahara DIPENDA MITRA	35,750,000.00	
	5.1.1.03.01	Rek. Kas DIPENDA MITRA		35,750,000.00

Sumber : Data olahan Penulis

2. Akuntansi Belanja Langsung (LS)

Pada tanggal 28 Agustus 2015 diterima SP2D-LS untuk belanja ATK (alat tulis kantor) kemudian diterima SP2D untuk belanja jasa kantor dan jasa servis sebesar Rp. 5,250,000.00

**Tabel 7.**  
**Contoh Jurnal Belanja**

Tanggal	Kode Rek.	Keterangan	Debit	Kredit
28 Agustus 2015	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,250,000	
		Rek. Kas DIPENDA MITRA		5,250,000

Sumber: Data Olahan Penulis

3. Akuntansi Beban (LO)

Pada tanggal 01 september 2015 Bendahara Dipenda Mitra mlakukan pembayaran gaji total sebesar Rp. 55 juta.

**Tabel 8.**  
**contoh jurnal beban**

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
01 september	Beban gaji	55,000,000	

	Kas di Dipenda Mitra		55,000,000
--	-------------------------	--	------------

sumber : data olahan penulis

### 3. Sistem Akuntansi Aset

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara hanya memiliki Aset lancar yaitu berupa kas yang dimiliki dinas ini dan Aset Tetap yaitu berupa peralatan dan mesin juga jalan, jaringan dan instalasi.

Dokumen yang digunakan dalam penggunaan aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Buku inventaris barang,
2. Berita acara serah terima pekerjaan,
3. Berita acara penilaian,
4. Berita acara serah terima barang,
5. Surat keputusan penghapusan,
6. Surat keputusan hibah,
7. Berita acara pemusnahan,
8. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD),
9. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum,
10. Bukti lainnya.

Contoh jurnal :

1. Pada tanggal 21 maret 2015 Dipenda Mitra melakukan belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 84,900,000.00 maka jurnal sebagai berikut

**Tabel 9.**  
**Contoh Jurnal Transaksi Belanja Modal**

Tanggal	Kode Rek.	Keterangan	Debit	Kredit
21 maret 2015	1.3.2.22.01	Belanja peralatan dan mesin  Estimasi perubahan SAL	Rp. 84,900,000	Rp. 84,900,000

Sumber: Data Olahan Penulis

2. Jurnal untuk mencatat penambahan nilai asset :

**Tabel 10.**  
**Contoh Jurnal Penambahan Nilai Aset**

Tanggal	Kode Rek.	Keterangan	Debit	Kredit
21 maret 2015	1.3.2.22.02	Aset Peralatan dan Mesin  Diinvestasikan dalam aset tetap	Rp. 84,900,000	Rp. 84,900,000

Sumber: Data Olahan Penulis

### 4. Sistem Akuntansi Kewajiban



Dalam hal ini pada SKPD yang diteliti yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tidak memiliki Kewajiban jangka pendek atau utang yang dibayar dalam jangka waktu 12 bulan, juga tidak memiliki kewajiban jangka panjang yaitu utang yang dibayar dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.

### 5. Sistem Akuntansi Ekuitas

Ekuitas Dana dari Dinas Pendapatan Daerah Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

**Tabel 11.**  
**Ekuitas Dana Dipenda Mitra**

Kode Rek.	Uraian	Tahun 2015
3	Ekuitas Dana	
3.1	Ekuitas Dana Lancar	
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	25.000.000,00
3.1.2	Cadangan Untuk Piutang	0,00
3.1.3	Cadangan untuk persediaan	0,00
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	0,00
3.1.5	Pendapatan yang ditanggguhkan	0,00
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	25.000.000,00
3.2	Ekuitas Dana Investasi	
3.2.1	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	0,00
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset tetap	101.031.334,00
3.2.3	Diinvestasikan dalam aset lainnya	0,00
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang	0,00
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	
	Ekuitas Dana Cadangan	101.031.334,00
3.3	Diinvestasikan dalam dana cadangan	
3.3.1	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	0,00
	Koreksi Ekuitas	0,00
3.4	Koreksi Ekuitas	
3.4.1	Jumlah Koreksi Ekuitas	0,00
	Jumlah Ekuitas Dana	0,00
		126.031.334,00

### 6. Sistem Akuntansi Selain Kas

Setiap akhir periode akuntansi dan anggaran tahunan PPK- SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara membuat Laporan Realisasi

### Pembahasan

Penulis meneliti tentang Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah dan membandingkannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010.

Analisis penerapan sistem akuntansi pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

No	Sistem Akuntansi Pemerintah	Dipenda Minahasa Tenggara	PP no. 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013	Keterangan
1.	Akuntansi Penerimaan Kas	Akuntansi penerimaan kas Dipenda Mitra terdiri dari Pendapatan –LO dan Pendapatan LRA yang penerimaannya berasal dari : PAD, Dana Perimbangan.	Akuntansi Penerimaan Kas terdiri dari Pendapatan – LO dan LRA yang berasal dari : PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya yang sah.	Sudah sesuai
2.	Akuntansi Pengeluaran Kas	Akuntansi Pengeluaran kas Dipenda Mitra terdiri dari beban dan belanja, belanja yaitu belanja uang persediaan (UP) dan belanja langsung (LS).	Akuntansi Pengeluaran kas terdiri dari belanja, beban, transfer, kewajiban, dan pembiayaan.	Sudah sesuai
3.	Sistem Akuntansi Aset	Akuntansi aset Dipenda Mitra terdiri dari aset lancar dan aset tetap yang dimilikinya.	Akuntansi aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah.	Sudah sesuai
4.	Sistem akuntansi kewajiban	Dipenda Mitra tidak memiliki kewajiban baik itu yang jangka panjang maupun jangka pendek.	Akuntansi kewajiban terdiri kewajiban jangka panjang dan jangka pendek	Sudah sesuai
5.	Sistem Akuntansi Ekuitas	Sistem akuntansi ekuitas yang dimiliki oleh Dipenda Mitra adalah berupa kekayaan dan selisih antara aset	Sistem akuntansi ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah dan merupakan selisih antara aset dan kewajiban.	Sudah sesuai, dengan pengecualian pada Ekuitas Dana Dipenda Mitra belum mengganti akun

6.	Sistem Akuntansi Selain kas	<p>dan kewajiban yang disusun dalam Neraca</p> <p>Dalam hal ini semua sistem akuntansi selain kas Dipenda Mitra dicatat dan dilaporkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.</p>	Sistem akuntansi selain kas seluruhnya dicatat dan pelaporannya disusun oleh SKPKD yaitu didalamnya dalam proses penyesuaian dan pembuatan CALK	<p>Ekuitas dana lancar, Ekuitas dana cadangan dan Ekuitas dana investasi dengan ekuitas SAL dan Ekuitas untuk dikonsolidasikan.</p> <p>Sudah Sesuai.</p>
----	-----------------------------	---	---	--

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

1. Untuk Satuan Kerja pada Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) yang sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013.
2. Pengelolaan keuangan daerah khususnya pada bidang pendapatan di kabupaten Minahasa Tenggara saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013 yang dimana Sistem Akuntansi Pemerintahnya dijalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
3. Dinas Pendapatan Daerah Sebagai SKPD, telah melakukan prosedur akuntansi yang terdiri dari, Akuntansi Penerimaan Kas, Akuntansi Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset, Akuntansi Kewajiban, Akuntansi Ekuitas dan Akuntansi Selain Kas yang sudah sesuai dengan pengecualian belum digantinya akun – akun pada ekuitas yaitu, Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

##### Saran

Dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis tentang “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara” sudah sesuai dengan pengecualian dimana perlu adanya penyesuaian secara keseluruhan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang baru yaitu berbasis akrual yang berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 yaitu semua jajaran pemerintahan daerah telah menerapkannya pada tahun 2015 dan diharapkan kepada SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat mempertahankan apa yang sudah dicapai bahkan terus meningkatkan prosedur sistem akuntansinya. Dan untuk

penyempurnaannya Dinas Pendapatan Daerah disarankan agar dapat selalu mengikuti perkembangan – perkembangan yang ada dan perubahan – perubahan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Paper dalam Jurnal*

- [1] Andi faradila, 2013. Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar Akuntansi pemerintahan (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010). Universitas hassanudin. Makassar.
- [2] Bastian indra. 2011. Akuntansi sektor publik. Edisi ke-tiga. Erlangga. Indonesia .
- [3] Cristy soputan, 2015. Penyajian laporan keuangan pemerintah Berdasarkan pp nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan di provinsi sulawesi utara. Manado, indonesia
- [4] Deddi nordiawan ,2012. Wiratna sujarweni, 2015. Akuntansi sektor publik, pengertian Akuntansi pemerintahan. Pustaka baru press
- [5] Drs. Ismail, mba, ak. 2010. Akuntansi bank. Jakarta . Penerbit kencana
- [6] Halim abdul. 2012. Akuntansi sektor publik, teori konsep dan aplikasi. Jilid 1. Salemba Empat. Indonesia
- [7] Indratno albertus, 2013. Prinsip – prinsip dasar akuntansi untuk pemula dan orang awam. Dunia cerdas. Indonesia
- [8] Klinik pajak fulcra 2013. Pelaporan keuangan berbasis akrual. [Http://fulcra.asia/pelaporan](http://fulcra.asia/pelaporan)
- [9] Keuangan-berbasis-akrual-accrual-basis/.

### *Buku*

- [10] Kuncoro, Mudrajat, 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan ekonomi: Bagaimana meneliti dan menulis tesis? Edisi ketiga. Erlangga, Jakarta..

### *Artikel dari Internet*

- [11] Pupung Musarofah, 2011. Sistem akuntansi pemerintahan <http://pupungmusarofah.blogspot.co.id/2013/03/sistem-akuntansi-pemerintahan-daerah.html>..
- [12] Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak. 2014. Wiratna Sujarweni 2015. Akuntansi sektor publik, pengertian akuntansi. Pustaka baru press.
- [13] Reeve, James M, Carl, S Warren et al. 2010. Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Principle of Accounting – Indonesian Adaption. Buku 2. Jakarta. Salemba Empat
- [14] Suri Yani, 2013. Standar akuntansi pemerintahan. <http://suryani.unis.blogspot.co.id/2013/06/standar-akuntansi-pemerintahan.html>.
- [15] White, J. G. dan G. Hancourt, 2012. “Double Entry Book Keeping: a conversation”. The Economic and labour relations review. Vol 23, No. 2, hlm. 89-104. <http://ijact.org/volume2issue6/IJ0260029.pdf>
- [16] Wiratna Sujarweni, 2015. Akuntansi Sektor Publik. Teori, konsep dan aplikasi. Pustaka baru press. Yogyakarta.
- [17] Dwi Martani, Universitas Indonesia, 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013. [https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2014/02/Permendagri-Nomor-64-Tahun-2013\\_243\\_1.pdf](https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2014/02/Permendagri-Nomor-64-Tahun-2013_243_1.pdf)
- [18] Eko Heri Winarno, 2015. Catatan mengenai penerapan Akrual pada Pemda . <http://www.warungkopipemda.com/beberapa-catatan-tentang-permendagri-64-tahun-2013-mengenai-penerapan-sap-berbasis-akrual-pada-pemerintah-daerah-2/>
- [19] Badan pendidikan pelatihan keuangan kementerian keuangan, 2014. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/19410-menyongsong-penerapan-akuntansi-pemerintahan-berbasis-akrual>
- [20] Fafa Ahmad, 2011. Media pembelajaran, PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

- Pemrintahan. <https://fafaahmad.wordpress.com/2011/05/15/pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/>
- [21] Kemendagri, 2011. Perubahan kedua atas peraturan pemerintah dalam negeri. [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2011/06/01/p/e/permendagri\\_no\\_21\\_tahun\\_2011\\_ttg\\_perubahan\\_kedua\\_atas\\_peraturan\\_menteri\\_dalam\\_negeri\\_no\\_13\\_tahun\\_2006.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2011/06/01/p/e/permendagri_no_21_tahun_2011_ttg_perubahan_kedua_atas_peraturan_menteri_dalam_negeri_no_13_tahun_2006.pdf).
- [22] Khalid Mustafa, 2011. Perubahan Permendagri nomor 12 Tahun 2006. <http://www.khalidmustafa.info/2011/06/03/perubahan-permendagri-nomor-13-tahun-2006.php>
- [23] Persona, 2015. Jenis jenis akuntansi. <http://www.persona.web.id/2015/11/jenis-jenis-akuntansi.html>.
- [24] Pemerintah.net, 2015. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. <http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html>.
- [25] Pengertian ahli, 2013. Metode penelitian, jenis - jenis data.
- [26] <http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html>
- [27] Wikipedia, 2016. Otonomi daerah, pelaksanaan otonomi daerah, tujuan otonomi daerah. [https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah).